

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman suku dan budaya. Namun, pasca orde baru dan bergulirnya era reformasi, benih-benih perpecahan suku didaerah mulai mengemuka dengan berlatar konflik kepentingan. Setelah runtuhnya orde baru,¹ banyak bermunculan komunitas politik yang dibentuk dan bertahan atas dasar nilai kultural yang juga dapat memberikan dampak pada budaya politik masyarakat pada daerah-daerah tertentu.

Budaya politik itu sendiri merupakan nilai umum dan mendasar yang dimiliki masyarakat terhadap politik dan pemerintahan. *Gabriel Almond* dan *Sidney Verba* dalam "*The Civic Culture*"² mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam baginya, dan sikap terhadap peranan warga negara didalam sistem itu. Lebih dari itu budaya politik juga berkaitan dengan fondasi legitimasi dan determinasi yang menyokong suatu sistem politik.

Konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar dari semua tindakan. Dimana dalam hal ini, budaya politik dipengaruhi oleh sistem kultural (adat istiadat) sebagai

¹ Mikail, Kiki. "PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019". *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15, no. 1 (April 7, 2016): 107-148. Accessed January 31, 2020. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444>.

² Nazaruddin Sjamsuddin, (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti), h.,21.

faktor dominan. Adat istiadat ini muncul dalam berbagai bentuk atau perwujudan, mencakup sejumlah nilai-nilai yang dimiliki bersama yang hidup dalam lingkungan geografis yang sama pula. Lingkungan ini setidaknya melahirkan suatu budaya politik masyarakat atau suku yang ada.

Konsep budaya politik juga merujuk kepada sikap politik dan pola perilaku penduduk, dan diasumsikan bahwa budaya ini sangat menentukan hubungan antara warga negara dengan sistem politik.³ Tegasnya, budaya politik hanya merujuk kepada sikap warga negara. Akan tetapi pada praktiknya budaya politik mencakup pola-pola perilaku yang erat kaitannya dengan sistem politik. Budaya politik juga merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas yang meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, dan proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah. Budaya politik disuatu daerah tidaklah seragam dan monolitik. Pada umumnya, terdapat perbedaan antara kultur utama dan subkultur, dan perbedaan antara sikap elite dan sikap massa yang menentukan legitimasi politik.⁴

Legitimasi politik terhadap kepemimpinan politik itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk memberikan motivasi kepada pemimpin mereka yang memiliki ikatan emosional, baik itu kekeluargaan, suku, bahkan keyakinan. Legitimasi politik yang diberikan tentu merupakan sebuah kata atau tindakan dari seseorang atau kelompok tertentu terhadap pemimpin yang didukungnya. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi, kegiatan

³ Mikail, K. (2018). IJTIHAD POLITIK ISLAM PALEMBANG DI MASA ORDE BARU. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 6(1), 30-53.

⁴Kacung Marijan, (2013). *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke Dua Puluh Satu*, (Jakarta : Kencana, Prenada Media Group), h.,321.

sosial bahkan sampai kegiatan budaya. Maka dari itu, legitimasi politik dapat langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan politik yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber legitimasi politik itu terhadap kepemimpinan politik.

Suksesi kepemimpinan lokal sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian direvisi pada tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah yang berlaku hingga saat ini. Artinya pemilihan kepala daerah tidak lagi ditentukan oleh elite politik di DPRD seperti orde baru, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Pilkada itu sendiri merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. Melalui pilkada, rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpinnya yang mereka nilai aspiratif (melibatkan aspirasi rakyat), kapabel (mampu menjadi pemimpin), kredibel (memiliki kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) dan akseptabel (diterima oleh rakyat)⁵.

Pada daerah yang multikultural, dinamika politik lokal menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang relatif homogen. Hal tersebut dapat kita lihat dari aktivitas politik lokal yang banyak melibatkan identitas politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan massa. Aspek suku tidak boleh dilupakan pengaruhnya dalam sikap dan budaya politik lokal yang tampak pada pilihan

⁵Nurhasanah Leni, (2012). *Demokrasi dan Budaya Politik Lokal di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, dkk.* (Jawa Timur : Jurnal Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Raden Intan Lampung) Vol. 8 No. 1, h., 30.

politik dan ekspresi budaya dalam melegalkan legitimasinya kepada pemimpin politik. Hal ini terutama terjadi pada daerah atau wilayah-wilayah yang mempunyai perimbangan suku dimana ada dua atau lebih suku dominan pada daerah atau wilayah tersebut.

Salah satu daerah yang memiliki masyarakat plural secara sosio-kultural yaitu Kabupaten OKU Selatan, dimana terdiri dari lima suku yaitu : Suku Daya, Suku Ranau, Suku Haji, Suku Kisam dan Suku Semende. OKU Selatan resmi menjadi kabupaten pada tanggal 16 Januari 2004, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Baru di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan banyaknya suku yang ada di Kabupaten OKU Selatan ini, membuat persaingan legitimasi politik menggunakan simbol-simbol kesukuan sangat kuat dan sikap politik sangat kental.

Tabel 1.1
Jumlah Suku di Kabupaten OKU Selatan

| No | Nama Suku | Jumlah Penduduk | Persentase |
|--------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | Ranau | 64.014 | 18,36 |
| 2 | Daya | 168.107 | 48,22 |
| 3 | Haji | 9.478 | 2,72 |
| 4 | Kisam | 44.063 | 12,64 |
| 5 | Semende | 62.912 | 18,06 |
| OKU Selatan | | 348.574 | 100,00 |

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari BPS OKU Selatan dalam angka tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa suku daya merupakan suku mayoritas di Kabupaten OKU Selatan, hal inilah yang menjadikan basis dukungan bagi rakyat suku daya sebagai suara terbanyak dan cukup besar memiliki pengaruh dalam setiap pemilihan kepala daerah di Kabupaten OKU Selatan.

Dengan adanya salah satu suku dominan pada, aspek suku juga dapat memberikan dampak pada budaya politik masyarakat OKU Selatan.

Budaya politik masyarakat OKU Selatan itu sendiri terbentuk karena adanya pengaruh nilai-nilai kultur maupun kepercayaan yang dianut mereka. Hal ini tercermin dari semboyan Kabupaten OKU Selatan yaitu *serasan seandanan*⁶. *Serasan* berarti satu kata, satu tujuan dan satu keinginan, dan *seandanan* berarti saling menasehati, saling membantu, bergotong royong dan saling mengurus. Hal demikian terlihat pada beberapa varian budaya politik yang terbentuk karena adanya nilai-nilai kultur (adat istiadat) yang digunakan dalam hidup bermasyarakat. Namun meskipun masyarakat OKU Selatan memiliki berbagai latar belakang budaya dan suku yang berbeda, namun hal ini tetap menjadikan budaya politik masyarakat OKU Selatan tetap seiring sejalan dengan satu tujuan.

Budaya politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di Kabupaten OKU Selatan memiliki beberapa varian yaitu : *Pertama*, aspek kultur (adat istiadat) sangat kuat basis lokalnya yang berpusat pada ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin tradisional maupun karismatik. *Kedua*, masyarakat OKU Selatan menyadari dirinya sebagai subyek, mereka patuh atas keputusan yang telah dibuat oleh sistem politik dan hal ini terkait dengan wewenang yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan. *Ketiga*, masyarakat OKU Selatan telah memiliki pemikiran yang modern, mereka mengetahui bahwa mereka adalah partisipan yang potensial dan mereka menerima keputusan dari sistem politik selama keputusan itu adalah hasil dari proses demokrasi. *Keempat*, masyarakat khususnya

⁶ okuselatankab.go.id, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

adat sangat setia pada sistem politik dan mereka mau mematuhi keputusan yang telah dibuat oleh sistem tersebut. Keempat varian budaya ini tentunya sangat berpengaruh terhadap legitimasi politik terhadap kepemimpinan politik yang ada.

Selain aspek budaya politik diatas, ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa terdapat persaingan legitimasi politik yang terjadi di Kabupaten OKU Selatan, yakni *Pertama*, sejak berdirinya kabupaten OKU Selatan hingga saat ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali pilkada, dimana hasilnya selalu dimenangkan oleh calon kepala daerah dari suku yang sama yaitu Suku Daya. *Kedua*, kekerabatan politik calon bupati OKU Selatan (Popo Ali Martopo saat ini) merupakan keponakan dari bupati sebelumnya yaitu Muhtadin Sera'i yang pada saat itu menjadi Ketua DPD Partai Golkar mengajukan Popo Ali Martopo sebagai calon Bupati OKU Selatan pada tahun 2015 silam. *Ketiga*, penggunaan latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten OKU Selatan sebagai salah satu adanya persaingan legitimasi budaya politik di Kabupaten OKU Selatan. Muhtadin Sera'i merupakan ketua Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten OKU Selatan (P3KOS) yang berasal dari suku yang sama dengan Bupati OKU Selatan saat ini yaitu Suku Daya. *Keempat*, Suku Daya pasca otonomi daerah Kabupaten OKU Selatan hingga post-otonomi daerah Kabupaten OKU Selatan, banyak menempati kedudukan dan jabatan pada bidang administratif pemerintahan daerah Kabupaten OKU Selatan. Sehingga hal ini memunculkan rasa kecemburuan sosial dari suku lainnya yang bermukim di Kabupaten OKU Selatan itu sendiri.

Berdasarkan varian budaya politik dan indikasi persaingan legitimasi politik pada masyarakat OKU Selatan diatas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti fenomena legitimasi politik. Sehingga peneliti merumuskan judul Legitimasi Politik Terhadap Kepemimpinan Politik di OKU Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana budaya politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan ?
2. Bagaimana legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui budaya politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.
2. Untuk mengetahui legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk dijadikan pedoman bagi para elite politik khususnya di Kabupaten OKU Selatan dalam mengelola masyarakat multietnik dengan mendahulukan kepentingan umum.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada kajian keilmuan ilmu politik dan untuk dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain agar menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk pada uraian kerangka teori, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka akan memberikan gambaran pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan pembahasan yang sama seperti judul penulis. Namun, dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dan berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhtar Haboddin dengan judul “*Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*”⁷ Penelitian ini menemukan bahwa menguatnya politik identitas diranah lokal sebagai basis perjuangan elite lokal dalam meraih kekuasaan. Politik identitas juga digunakan sebagai alat politisasi politik yang dikemas dan dikreasikan sedemikian rupa dan dalam bentuk yang bervariasi. Basis perjuangan elite lokal dalam menarik simpatik budaya politik lokal juga memiliki beberapa kecenderungan. *Pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau hak-hak dasar sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. *Kedua*, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. *Ketiga*, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya. Penelitian yang ditulis oleh Muhtar Haboddin menjelaskan tentang bagaimana peranan orang-orang Irian, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dalam mengambil keputusan mengenai mereka sendiri seperti termarginalkan. Adanya dominasi kaum pendatang yang menduduki jabatan sehingga menimbulkan masyarakat Irian ingin memisahkan diri dari NKRI. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang bagaimana legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

⁷ Muhtar Haboddin, (2007). *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, (Malang : Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Barawijaya).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wasisto Raharjo Djati “*Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di Aras Lokal*”⁸ penelitian ini membahas tentang familisme sebagai budaya politik yang ditujukan pada kecenderungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, sehingga melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wasisto Raharjo Djati tersebut juga membahas tentang varian budaya politik. *Pertama*, familisme (*familism*), yakni budaya politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*marriage*) dengan klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menggantungkan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik itu. *Kedua*, quasi-familisme, model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Semua anggota keluarga berusaha mengidentifikasi diri melalui simbol-simbol tertentu agar mendapat legitimasi dari keluarga lainnya. *Ketiga*, egoism-fasisme, budaya politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Egoisme dari kepala daerah memiliki kecenderungan mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi kepemimpinan. Kepala daerah yang digantikan masih memiliki pengaruh terhadap penggantinya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan penafsiran

⁸ Djati, Wasisto Raharjo, (2013). *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di Aras Lokal*, (*Jurnal Sosiologi Masyarakat*) Vol. 18 No. 2.

terdapat pemerintah bayangan yang dilakukan kepala daerah demisioner terhadap pengantinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengamankan program-program kebijakan maupun proses penganggaran yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Wasisto Raharjo Djati menjelaskan bahwa adanya kekuatan familisme yang dapat menjadikan satu kaum menjadi lebih kuat di atas kaum lainnya. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, karena penelitian tidak hanya terfokus pada kekuatan familisme saja. Namun, lebih terfokus pada legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Mansur dkk “*Otoritas dan Legitimasi Kedudukan Pemimpin Tradisional di Loloda Maluku Utara (1808-1958)*”⁹. Penelitian ini membahas adanya kedudukan pemimpin tradisional setelah kemerdekaan Indonesia menunjukkan adanya legitimasi tradisional pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain adanya legitimasi legal-rasional. Kondisi ini tergambar dari kerajaan Loloda yang disamakan dengan distrik, namun pemimpinnya tetap mempertahankan gelar raja. Upaya mempertahankan gelar raja merupakan bentuk dari otoritas tradisional dan kharismatik dari penguasa loloda karena merupakan bentuk warisan status sosial dalam masyarakat (*ascribed status*). Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Mansur dkk menjelaskan bahwa adanya kekuatan otoritas tradisional yang menunjukkan adanya legitimasi tradisional pada satu sisi dan pada sisi lain adanya juga legitimasi legal-rasional.

⁹Mustafa Mansur dkk, (2013). *Otoritas dan Legitimasi Kedudukan Pemimpin Tradisional di Loloda Maluku Utara (1808-1958)*, (Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate), Vol.15 No. 1.

Artinya adanya kesetaraan pemimpin lokal secara legalitas dan pemimpin tradisional dengan mempertahankan gelar raja. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah Leni “*Demokrasi dan Budaya Politik Lokal di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, dkk*”¹⁰, dalam penelitian ini membahas budaya politik lokal masyarakat Jawa Timur yang terbuka, ekspresif, artikulatif dan menyatakan apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat Jawa Timur juga sering merespon peristiwa-peristiwa politik melalui sikap budaya dan memunculkan gerakan sosial melalui seni budaya. Kesenian dapat pula dipakai untuk mengukuhkan kelas sosial mereka, perlawanan tersebut dijadikan sebagai basis legitimasi teori untuk mengambil atau mendasarkan kesenian tidak hanya sebagai estetika dan artistik saja. Namun lebih dari itu, nilai budaya lokal masyarakat Jawa Timur juga menjadikan kesenian budaya mereka sebagai bentuk gerakan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah Leni menjelaskan bagaimana budaya politik lokal masyarakat Jawa Timur dalam merespon peristiwa-peristiwa politik melalui seni budaya yang merupakan sebagai gerakan sosial politik mereka. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

¹⁰*Op. cit*, Nurhasanah Leni.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin Salim “*Politik Identitas di Maluku Utara*”¹¹, dalam penelitian ini membahas potensi besar yang dimiliki kekuatan etnisitas ditingkat lokal tentunya dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional, sehingga untuk meloloskan kepentingannya. Maka isu etnisitas dipandang lebih mempunyai peluang untuk itu proses penggarapan dukungan massa menjadi target utama propaganda elite, sehingga isu etnisitas dapat terus diproduksi dan dimaikan secara masif. Salah satu persoalan yang muncul sebagai implikasi dari menguatnya isu etnisitas adalah adanya perasaan sentimen etnis tertentu atas berkuasanya etnis lain disuatu wilayah. Akibatnya, masyarakat merasa terpinggirkan dalam wilayah ekonomi ataupun politik. Keterbatasan akses tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pengkonsolidasian identitas dengan memilih etnis sebagai kendaraan untuk mempertahankan eksistensinya. Penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin Salim menjelaskan adanya kekuatan etnisitas lokal di Maluku Utara yang dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional dengan memunculkan isu etnisitas sebagai peluang dalam penggarapan dukungan massa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

¹¹ Kamaruddin Salim, (2015). *Politik Identitas di Maluku Utara*, Jurnal Politik Vol 11. No.2, Universitas Nasional.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Kristianus, “*Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat*”¹², penelitian ini membahas Kalimantan Barat sebagai masyarakat multikultural merupakan salah satu daerah yang rentan dihadapkan dengan permasalahan gesekan-gesekan yang bernuansakan SARA dalam persaingan politik tersebut secara politis. Kondisi ini muncul diakibatkan karena keinginan komunitas lokal dalam waktu yang cukup lama terabaikan sebagai konsekuensi dan bangunan sistem politik dan pemerintahan yang sentralistik. Hal ini juga berdampak pada kebijakan dan pengintegrasian nilai-nilai dan kultur yang dibentuk oleh rezim orde baru, namun sesungguhnya diterima secara “terpaksa”. Penelitian yang dilakukan oleh Kristianus menjelaskan adanya gesekan-gesekan nilai-nilai budaya politik masyarakat Kalimantan Barat dengan bernuansa SARA yang mengakibatkan kebijakan diterima secara terpaksa. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Joni Iskandar dengan judul “*Politik Etnik Pada Pilkada OKU Selatan 2015 (studi kasus kemenangan Popo Ali Martopo)*”¹³, penelitian ini membahas tentang kekuatan suku dominasi di OKU Selatan yaitu Suku Daya yang sangat berpengaruh dalam pemenangan calon kepala daerah dari suku nya. Popo Ali Martopo menggalang banyak suara

¹² Kristianus, (2016). *Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat*, (Jurnal Politik Indonesia : Indonesian Political Science Review 1), Universitas Negeri Semarang.

¹³ Joni Iskandar, (2019). Skripsi *Politik Etnik dalam Pilkada OKU Selatan 2015, (studi kasus kemenangan Popo Ali Martopo)*, (FISIP : UIN Raden Fatah Palembang), h., 3.

dengan memunculkan isu etnisitas sehingga ia terpilih menjadi Bupati OKU Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Joni Iskandar menjelaskan bahwa adanya indikasi yang menjadikan Popo Ali Martopo sebagai bupati terpilih Kabupaten OKU Selatan yaitu dari suku mayoritas dalam hal ini Suku Daya. Dengan adanya kesamaan bahasa, latar belakang sejarah berdirinya OKU Selatan, kekerabatan politik dan juga faktor garis keturunan yang menjadikan Popo Ali Martopo menggalang suara di beberapa tempat yaitu pada daerah Suku Daya, Suku Haji, Suku Kisam dan Suku Semende. Namun Popo Ali Martopo sedikit sekali mendapat dukungan suara pada daerah dengan daerah pilihan pada Suku Ranau. Sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih memfokuskan pada legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, memberikan implikasi bahwa fenomena budaya politik makin tampak pada daerah-daerah yang multi-etnik yang pembentukannya atas dasar etnik dominan. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *Beyme*, bahwa tindakan politik identitas pada hakikatnya adalah suatu gerakan sosial yang ingin mengubah kondisi masyarakatnya. Namun, dalam perjalanan berikutnya menang, politik identitas justru dimanfaatkan oleh kelompok *majority* untuk menguatkan dominasi kekuasaannya melalui pola-pola penggunaan identifikasi “kita-lawan-mereka”.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian kualitatif, teori ditempatkan sebagai acuan dan kerangka dasar penelitian yang dilakukan. Fungsi kerangka teori adalah sebagai alat analisa dari hasil penelitian yang akan penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep budaya politik *Gabriel Almond* dan *Sidney Verba* dan Teori Legitimasi politik dari *Max Weber* sebagai alat untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di Kabupaten OKU Selatan¹⁴.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada legitimasi politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan yang dapat mempengaruhi sikap politik pada masyarakat di OKU Selatan. Budaya politik menurut (*Lucian Pye dan Sidney Verba*), mengatakan bahwa “*system of empirical beliefs, expressive symbols, and values which define the situation in which political action take place*” (budaya politik itu sendiri merupakan sistem kepercayaan empiris, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang merumuskan situasi dimana tindakan politik dilakukan). Budaya politik berbicara tentang sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan sikap tertutup dan tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi politik harus dipikirkan oleh setiap pemimpin atau pemerintah daerah dalam mengelola sistem politik yang mempunyai masyarakat multikultur¹⁵

¹⁴S. Aminah dan Roikan, (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (PRENADAMEDIA GROUP : Jakarta), Edisi ke-I, h., 134-136.

¹⁵Tareh Rasyid, (2017). *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta), Cet. Ke-1, h.,102.

Pada ranah birokrasi daerah dapat ditemui bentuk kepemimpinan formal yang disertai dengan karakteristik kepemimpinan dalam budaya lokal. Nilai-nilai budaya pada daerah telah mengalami pergeseran makna yang menyebabkan kekuasaan di daerah semakin terbuka setidaknya untuk kalangan elite, yakni kecenderungan dominasi kelompok keturunan. Nilai-nilai budaya tersebut dapat kita lihat dari kecenderungan kelompok-kelompok elite dan upaya mereka dalam mendominasi ranah dalam kehidupan demokrasi menunjukkan karakteristik, kekuatan etos, serta nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu hubungan unsur-unsur hegemoni yang instrumental dalam budaya lokal dan kecenderungannya sebagai preferensi praktik-praktik politik dan relasi kekuasaan yang menyebabkan budaya dan tata nilai yang membentuk budaya politik itu sendiri.¹⁶

Pada daerah tertentu terkhusus pada daerah yang multikultur, budaya politik terbentuk karena adanya nilai-nilai umum yang mendasarkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga hal ini dapat membentuk pada sikap politik masyarakat dan legitimasi politik terhadap kepemimpinan. Seorang pemimpin tentunya memiliki otoritas terhadap masyarakatnya, dimana pemimpin berhak untuk mengatur dan membuat suatu kebijakan untuk masyarakat karena pemimpin tersebut dalam memperoleh wewenang sebab memiliki status sosial.

¹⁶ A.M. Yusuf, (2017). *Hegemoni Budaya dalam Praktik Politik dan Kekuasaan di Belawa*, (Jurnal Etnografi Indonesia), Vol.2 Edisi 1.

Dalam konsep status sosial menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok memiliki status sosial karena tiga hal. *Pertama*, ia menerima status sosialnya sebagai bentuk warisan (*ascribed status*). *Kedua*, seseorang memperoleh status sosial sebagai bentuk amanah (*assigned status*). *Ketiga*, status sosial yang dicapai atau diperoleh melalui suatu usaha (*achieved status*). Adapun konsep legitimasi merujuk pada cara-cara yang dipakai para pemimpin negara untuk mendapatkan dukungan penduduk yang dikuasai atau kepercayaan sosial¹⁷.

Dalam konsep budaya politik *Gabriel Almond* dan *Sidney Verba*¹⁸, bentuk budaya politik masyarakat secara umum, yaitu *Pertama (Partisipan)*, merupakan budaya politik dimana rakyat mengerti peranannya sebagai warga negara dan memperhatikan perkembangan politik. Mereka bangga akan sistem politik negara mereka dan bersedia untuk berdiskusi tentang politik. Mereka percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi politik dan mengklaim akan membentuk sebuah kelompok untuk memprotes ketidakadilan. Budaya politik partisipan merupakan landasan yang ideal untuk mempertahankan demokrasi.

Kedua (Subjek), merupakan budaya politik yang bersifat kurang demokratis dibandingkan dengan budaya politik partisipan, dimana masyarakat memahami peranannya sebagai warga negara dan memperhatikan politik, namun bertindak lebih pasif. Mereka mengikuti pemberitaan politik, tetapi tidak bangga dengan sistem politik dan hanya memiliki sedikit komitmen emosi terhadap politik. Mereka merasa tidak nyaman untuk mendiskusikan politik dan

¹⁷*Op.cit*, Mustafa Mansur dkk, h.,66.

¹⁸ Micheal G Roskin, (2016). *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta : KENCANA), Cet. Ke-1, Edisi ke- XIV, h.,134-135.

menganggap kemampuan mempengaruhi politik hanya sebatas berdialog dengan pejabat setempat. Demokrasi kesulitan untuk berkembang dalam budaya politik seperti ini, yakni masyarakatnya terbiasa menganggap dirinya sebagai subyek yang patuh ketimbang sebagai partisipan.

Ketiga (Parokial), merupakan budaya politik yang kurang demokratis. Dimana masyarakatnya tidak terlalu peduli dengan identitasnya sebagai warga negara. Mereka tidak bangga terhadap sistem politik negara mereka dan tidak mengharapkan apapun. Mereka tidak menaruh perhatian sedikitpun pada perkembangan politik, mereka memiliki sedikit pengetahuan tentang politik dan tidak membicarakan politik. Budaya politik seperti ini merupakan budaya politik paling rendah.

Budaya politik yang ada pada masyarakat tentunya berkaitan dengan legitimasi politik masyarakat terhadap seorang pemimpin. Dalam hal ini *Max Weber* memberikan definisi legitimasi sebagai berikut¹⁹ :

“people may have faith in a particular political or social order because it has been there for a long time (tradition), because they have faith in the rulers (charisma), or because they trust its legality—specifically the rationality of the rule of law”.

“orang bisa memiliki kepercayaan dalam tatanan politik atau sosial tertentu untuk waktu yang lama (tradisi), karena mereka memiliki kepercayaan kepada penguasa (karisma), atau karena mereka percaya pada legalitas khususnya rasionalitas aturan hukum”.

¹⁹ Ely Nor Ekawati. (2012). *Legitimasi Politik Pemerintah Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol.1, Edisi 2, h.,60.

Berdasarkan pernyataan *Weber* diatas, bahwa pemerintah mendapatkan legitimasi sangat tergantung pada pandangan masyarakat berdasarkan kebiasaan (tradisi), karena faktor karismatik, dan atau disebabkan oleh kerangka pandang terhadap rasionalitas aturan hukum yang dipercayai oleh masyarakat.

Memahami legitimasi sebagai sosiologis *phenol menon* disediakan oleh *Max Weber*, yang mengkategorikan “sistem dominasi” tertentu dan untuk mengidentifikasi dalam setiap kasus dasar dimana legitimasi itu didirikan. *Weber* melakukan ini (legitimasi)²⁰ dengan membangun tiga hal, *Pertama*, “*Otoritas Tradisional*”, legitimasi politik didasarkan pada kebiasaan lama dan terbentuk dari tradisi. Akibatnya, otoritas tradisional dianggap sebagai yang sah karena “selalu ada”. Otoritas tradisional ditemukan diantara suku-suku atau kelompok-kelompok kecil yang didominasi yang terkait erat dalam sistem keturunan kekuasaan dan hak istimewa.

Kedua, “*Otoritas Karismatik*”, merupakan bentuk otoritas yang didasarkan pada kekuatan kepribadian seorang individu yaitu pada karisma atau kesaktiannya. Otoritas karismatik ini juga beroperasi sepenuhnya melalui kapasitas dari pemimpin untuk membuat daya tarik langsung dan pribadi untuk pengikut sebagai semacam pahlawan. Namun otoritas karismatik bukan hanya hadiah atau kecenderungan alami sistem aturan pribadi yang selalu didukung oleh kultus kepribadian yang bertujuan untuk memproduksi karisma. Dengan demikian, ketika legitimasi dibangun sebagian besar atau seluruhnya, melalui kekuatan kepribadian seorang pemimpin, biasanya ada dua konsekuensi yaitu,

²⁰ Andrey Heywood, (2013). *Politics* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), h., 80.

Pertama, wewenang sebagai karismatik tidak didasarkan pada aturan atau prosedur formal. *Kedua*, otoritas terkait dengan individu tertentu, merupakan sulit untuk mempertahankan sistem pemerintahan pribadi untuk hidup lebih lama dari sosok pendirinya.

Ketiga, “*Otoritas Legal-rasional*”, merupakan bentuk otoritas yang didasarkan pada kepercayaan terhadap tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Dalam otoritas ini *Weber* menyatakan, bentuk khas paling modern adalah negara. Kekuatan seorang pemimpin ditentukan dalam analisis akhir oleh aturan konstitusi formal yang membatasi untuk sebuah tindakan politik. *Beetham* menyatakan dalam bukunya (*Beetham D, the legitimation of power*)²¹ kekuasaan hanya dapat dikatakan sah jika tiga kondisi terpenuhi. *Pertama*, kekuasaan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan aturan, apakah ini diwujudkan dalam kode hukum formal atau dalam konvensi informal. *Kedua*, aturan itu harus dibenarkan dalam hal keyakinan bersama dari pemerintah dan yang diperintah. *Ketiga*, legitimasi harus ditunjukkan oleh ekspresi persetujuan dari pihak yang diperintah, yakni adanya pemilu dan kompetisi partai, sistem dimana persetujuan populer dapat dieksekusi dan asasnya aturan konstitusional yang secara luas mencerminkan bagaimana orang merasa mereka harus diatur.

²¹*Ibid*, h.,83.

Berdasarkan pemahaman dari teori legitimasi *Max Weber* dapat diturunkan pada dimensi dari legitimasi politik. Dimensi legitimasi politik itu sendiri dalam penyelenggaraannya, Edy Ariansyah menyebutkan :

“akseptabilitas (legitimasi) dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi kewenangan (otoritas) dan dimensi keputusan politik. Dimensi kewenangan dan keputusan politik tentu dikaitkan dengan siapa yang melegitimasinya.

Dimensi kewenangan (otoritas) politik merupakan suatu kekuatan yang didapatkan oleh institusi politik untuk bertindak sesuai unsur nilai (norma dan aturan) secara substansi dari sumber kewenangan yang didapatkan. Ketika ada unsur nilai berarti terdapat pengaruh didalamnya yang wajib ditaati oleh yang dipengaruhi, baik pemerintah mempengaruhi rakyat maupun sebaliknya rakyat mempengaruhi pemerintah. Kewenangan politik memiliki indikator kewajiban politik berdasarkan kesatuan dukungan rakyat. Kewajiban politik menjadi nilai tertentu bagi rakyat untuk memperkuat dan mempertahankan dan atau menarik dukungan. Legitimasi budaya politik dapat mengalami krisis jika pemimpin politik atau pemerintah tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan secara utuh.

Sedangkan keputusan politik sebagai bagian dari dimensi legitimasi politik dengan melihat kehidupan politik dalam suatu pemerintah berdasarkan perspektif kelembagaan baru yang menekankan bukan pada proses-proses yang terjadi didalamnya yang menjadi fokus utama, melainkan menekankan pada gejala-gejala (fakta) kausalitas dari legitimasi kebijakan politik secara akal sehat (*common*

sense) yang menjelaskan legitimasi politik di lingkungan pemerintah sesuai praktek politik formal dan jaringan organisasi formal. Lebih tegasnya merujuk pada pendapat *David Easton* (1971), bahwa²² :

“political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society”.

“kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat”.

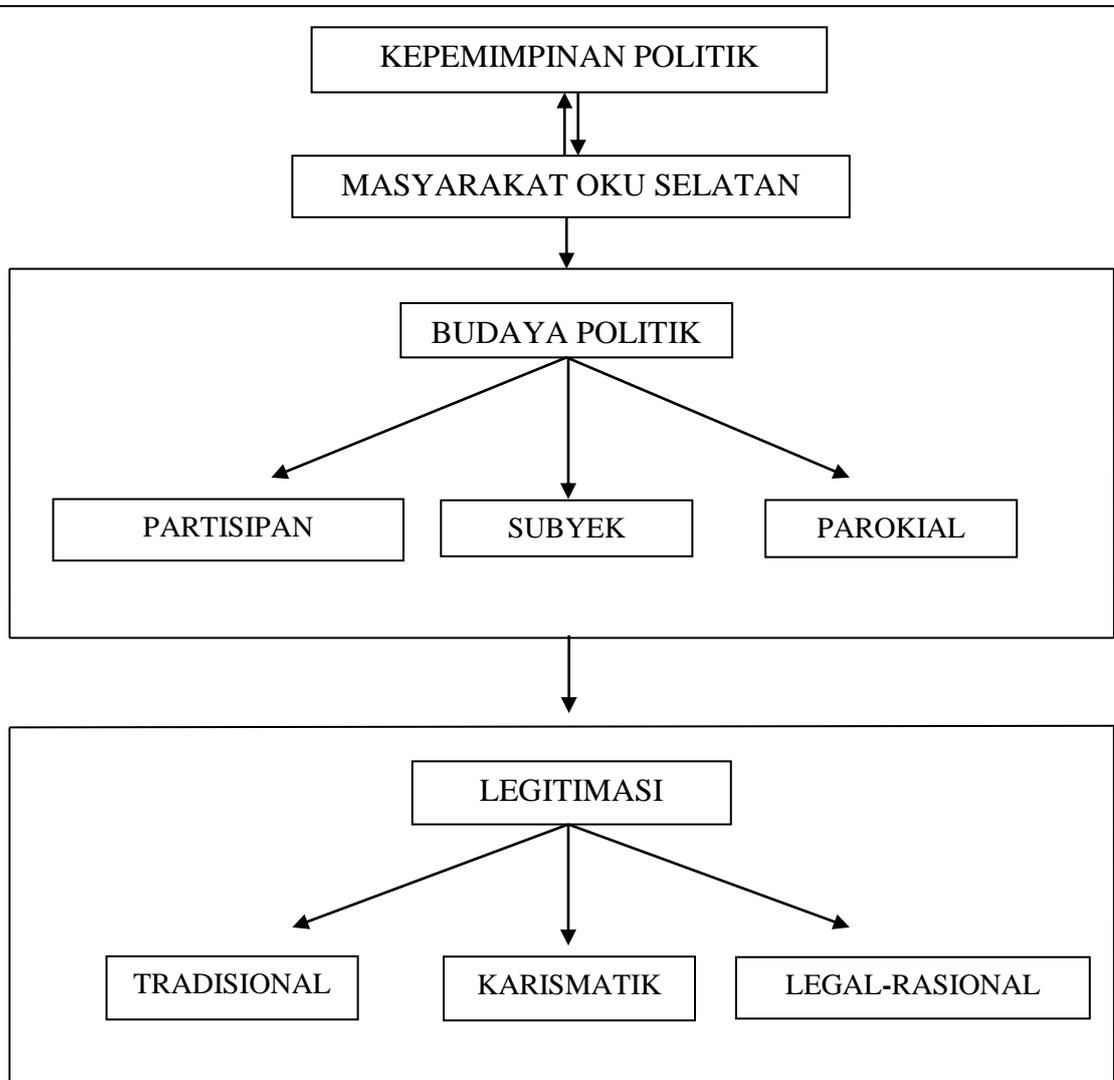
Berkaitan dengan legitimasi dan otoritas, keduanya perlu diselaraskan dengan kapabilitas untuk memahami konstruksi pandangan sosial dalam melaksanakan agenda atau program yang berhubungan secara langsung yang menyentuh kepentingan rakyat, sebab rakyat memegang legitimasi tertinggi. Ukuran pencapaiannya adalah kesejahteraan (materil dan imateril) rakyat yang ditempuh pemerintah dengan menjalankan fungsinya. Dengan demikian, dapat dikerucutkan bahwa kewenangan (otoritas) yang terlegitimasi dapat juga berbanding lurus dengan kecakapan sumber legitimasi. Jika periode pemerintahan yang stabil dan efisien serta pertumbuhan ekonomi akan memperkuat legitimasi. Sebaliknya, jika periode pemerintahan yang tidak tegas, penuh kekacauan serta kemunduran ekonomi akan berakibat pada melemahnya legitimasi²³.

²²*Ibid*, h.,62.

²³*Opc.cit*, h.,133.

Melemahnya legitimasi budaya politik terhadap pemerintah juga berdampak pada pilihan politik maupun budaya masyarakat menutup diri merupakan jalan terbaik untuk mengikuti jejak langkah politik kekuasaan orde baru. Karena itu ketika daerah sudah mengalami pelemahan basis materialnya maka masyarakat meminjam istilah *Henk S Nordholt*²⁴ yaitu “mencari perlindungan pada kelompok agama dan etnisitas”. Pencarian perlindungan masyarakat kepada agama dan etnisitas cepat atau lambat akan membahayakan posisi pemerintah dalam bangunan relasi vertikalnya, tetapi juga rawan, rentan, penuh resiko dan sangat berbahaya pada relasi horizontalnya.

²⁴*Op. cit*, Muhtar Haboddin, h.,115.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh peneliti

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan / Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan tipe penelitiannya adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, dimana prosedur penelitian ini menghasilkan sebuah deskripsi, yakni menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Legitimasi Politik Terhadap Kepemimpinan Politik di OKU Selatan.

2. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden yaitu pemangku adat dan kepada masyarakat Suku Daya, Suku Ranau, Suku Haji, Suku Kisam dan Suku Semende yang ada di Kabupaten OKU Selatan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi tesis, artikel dan internet yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu Legitimasi Politik Terhadap Kepemimpinan Politik di OKU Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten OKU Selatan, yaitu salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki masyarakat multikultur. Dalam hal ini suku di Kabupaten OKU Selatan ada lima suku, yaitu Suku Daya, Suku Ranau, Suku Haji, Suku Kisam dan Suku

Semende. Dimana fokus pembahasannya adalah Legitimasi Politik Terhadap Kepemimpinan Politik di OKU Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengamati fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Legitimasi Politik Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Politik di OKU Selatan, yaitu pada Suku Daya, Suku Ranau, Suku Haji, Suku Kisamdan Suku Semende yang bermukim di Kabupaten OKU Selatan itu sendiri.

²⁵ Suharisimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta) h., 272.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian²⁶. Dalam wawancara ini penyusun menggunakan pertanyaan terbuka, karena dalam hal ini akan mempermudah untuk diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan kepada beberapa responden yakni, wawancara dengan pemangku adat dan kepada masyarakat Suku Daya, Suku Ranau, Suku Haji, Suku Kisam dan Suku Semende.

²⁶ Sutrisno Hadi. (1987). *Metodologi Research II*, (Yogyakarta : Andi Offset) h., 193.

Berikut ini adalah daftar identitas responden dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Identitas Responden

| No. | Nama (<i>Gelar Suku</i>) | Usia (Tahun) | Pekerjaan | Pendidikan (Terakhir) | Suku |
|-----|---|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Ahmad Buchori (<i>Sultan Takdir Sah 1</i>) | 74 | Wiraswasta | SLTA/Sederajat | Pemangku Adat Suku Ranau |
| 2. | Erwin Shohari | 35 | Pegawai Honorer | D.III | Tokoh Adat |
| 3. | Hasim Ihsan | 47 | Wiraswasta | SLTA/Sederajat | Tokoh Agama Suku Ranau |
| 4. | Cik Wi Alam (<i>Raden Intan</i>) | 80 | Wiraswasta | Sekolah Dasar (SD) | Pemangku Adat Suku Daya |
| 5. | Helmi Edison | 32 | Pegawai Swasta | S.1 | Tokoh Adat Suku Daya |
| 6. | Aridi | 68 | Petani | SLTP/Sederajat | Pemangku Adat Suku Semende |
| 7. | Sahrul Junaidi | 60 | Kepala Desa | SLTP/Sederajat | Tokoh Adat Suku Semende |
| 8. | Haji Pawiman | 71 | Pensiunan Guru PNS | SPG | Koordinator Adat Suku Kisam |
| 9. | Ahmad Hasran (<i>Raden Intan</i>) | 73 | Wiraswasta | Sekolah Dasar (SD) | Tokoh Adat Suku Haji |
| 10. | Ruslan Arifin | 43 | Petani | Sekolah Dasar (SD) | Tokoh Adat Suku Haji |

Sumber : Diolah oleh peneliti dari hasil wawancara

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau masalah yang akan diteliti, melalui literature buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, internet, dan juga bisa dari notulen rapat yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Legitimasi Budaya Terhadap Kepemimpinan Politik di OKU Selatan.

5. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari beberapa responden yakni, wawancara dengan pemangku adat serta masyarakat Suku Daya, Suku Ranau, Suku Haji, Suku Kisam dan Suku Semende yang bermukim di Kabupaten OKU Selatan. Kemudian data tersebut dicatat dan dikumpulkan dan data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab dengan responden yang ditulis secara lengkap.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, yaitu pada observasi dan wawancara dengan pemangku adat serta dari

masyarakat Suku Daya, Suku Ranau, Suku Haji, Suku Kisamdan Suku Semende. Reduksi data bertujuan untuk memberi gambaran dan mempertajam hasil dari pengamatan yang sekaligus untuk mempermudah kembali pencarian data yang diperoleh.

c. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks kedalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Tahap ini merupakan intepetasi peneliti, dimana peneliti menggambarkan makna dari kata yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan tidak terjadi salah pemaknaan dalam penyimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memudahkan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis urutkan sistematika pembahasan penelitian ini yakni **BAB I** Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan pendahuluan yang merupakan penjelasan singkat mengenai isi keseluruhan dari penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Kabupaten OKU Selatan. Pembahasan dalam bab ini meliputi kondisi geografis, kondisi demografis yang terdiri dari penduduk dan ketenagakerjaan, sistem pemerintahan di OKU Selatan terdiri dari wilayah administratif, sumber daya manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pilkada OKU Selatan terdiri dari Pilkada OKU Selatan 2005, Pilkada OKU Selatan 2010 dan Pilkada OKU Selatan 2015. Kondisi sosial yang terdiri dari pendidikan, agama, kriminalitas dan kemiskinan, kondisi budaya yang terdiri dari persebaran suku di Kabupaten OKU Selatan dan asal mula suku di Kabupaten OKU Selatan.

BAB III Hasil dan Pembahasan, pada bab ini dijelaskan jawaban dari rumusan masalah yaitu membahas mengenai budaya politik dan legitimasi budaya terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan. Pembahasan dalam bab ini meliputi, budaya politik masyarakat OKU Selatan yang terdiri dari budaya politik partisipan, budaya politik subyek dan budaya politik parokial, legitimasi budaya

pada masyarakat OKU Selatan yang terdiri dari otoritas tradisional, otoritas karismatik dan otoritas legal-rasional.

BAB IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang berisikan dari berbagai permasalahan mengenai legitimasi budaya terhadap kepemimpinan politik di OKU Selatan.

